

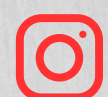


INFO LEGISLASI

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI
MANUSIA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

12 Desember 2025

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN KEAHLIAN DPR RI



PENANGGUNGJAWAB

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
(Kepala Pusat PUU Polhukham Badan Keahlian DPR RI)



TIM PENYUSUN

Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.	Yeni Handayani, S.H., M.H.	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.	Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.
Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.	R. Priharta Budiprasetya, S.H., M. Kn.		Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	Agus Priyono, S.H.	Apriyani Dewi Azis, S.H.	Stephanie Rebecca Magdalena, S.H., M.H.
Christina Devi Natalia, S.H., M.H.	Yanuar Putra Erwin, S.H.	M. Nurfaik, S.H.I.	Maria Priscyla Stephfanie F.W, S.H.
Tommy Cahya Trinanda, S.H., LLM	Shintya Andini Sidi, S.H.	Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H
Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Sumitra Abdi Negara, S.H.		



TIM WEBSITE

Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.	Shintya Andini Sidi, S.H.,M.H.
Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Maria Holi Raydenti, S.Psi.	Santoso Wahyu Nugroho, S.T.



More information
puupolhukham

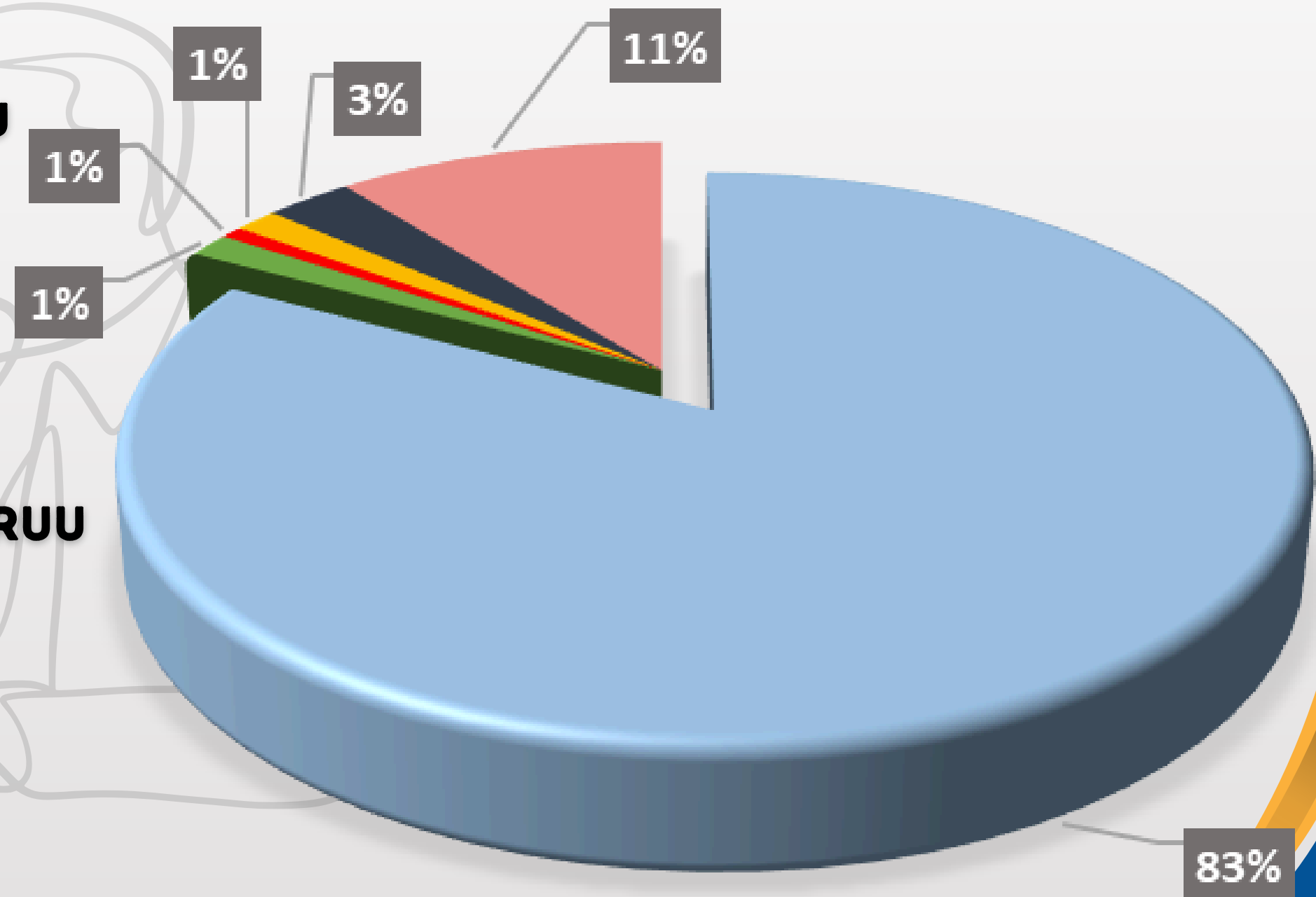


Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2025

KETERANGAN:

- **PENYUSUNAN PUSAT PUU POLHUKHAM: 116 RUU**
- **PENYUSUNAN AKD: 2 RUU**
- **HARMONISASI: 1 RUU**
- **AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I: 2 RUU**
- **PEMBICARAAN TINGKAT I: 4 RUU**
- **PEMBICARAAN TINGKAT II: 15 RUU**



More information
[puupolhukham](#)



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



PENYUSUNAN PUSAT PUU POLHUKHAM



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Komisi Yudisial	1. Penyesuaian materi muatan RUU tentang KY dengan perkembangan hukum yang diatur dalam beberapa UU serta tindak lanjut putusan MK 2. Perubahan susunan keanggotaan KY 3. Pembentukan kantor perwakilan KY 4. Perubahan jumlah calon Hakim Agung yang diajukan ke DPR 5. Penguatan terhadap usulan KY tentang penjatuhan sanksi 6. Perubahan komposisi Majelis Kehormatan Hakim 7. Peningkatan peran partisipasi masyarakat
2.	RUU tentang Jabatan Hakim	1. Perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara 2. Keterlibatan KY dalam perekrutan hakim 3. Pengaturan Jabatan Hakim Masih Bersifat Parsial dan Tersebar 4. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Hakim 5. Tindak Lanjut tentang Hak Keuangan Hakim dalam UU MA

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	1. Harmonisasi rumusan definisi dan bentuk ancaman 2. Ketidakharmonisan regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan 3. Optimalisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait pertahanan nasional dan pelaksanaan PKBN 4. Pendataan sumber daya nasional pada setiap sektor 5. Partisipasi masyarakat dalam bela negara
4.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	1. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.121IPUU-XKIII2024 tentang pembentukan lembaga independen yang melakukan pengawasan Sistem Merit ASN 2. Perpanjangan batas usia pensiun

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perampasan Aset	1. Eksekusi perampasan aset melalui metode <i>in personam</i> belum optimal 2. Modifikasi <i>in personam</i> dan <i>in rem</i> sebagai upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana 3. Penerapan <i>non-conviction based forfeiture (In rem)</i> dalam kondisi tertentu 4. Prosedur acara perampasan aset melalui <i>in rem</i> secara khusus di luar prosedur acara pidana biasa 5. Optimalisasi Tata Kelola Aset Sitaan dan hasil rampasan negara 6. Mekanisme Kerja Sama Internasional PA berdasarkan prinsip resiprositas (bagi hasil)



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Kabupaten Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
7.	RUU tentang Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
8.	RUU tentang Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
9.	RUU tentang Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
10.	RUU tentang Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Kabupaten Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
12.	RUU tentang Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
13.	RUU tentang Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
14.	RUU tentang Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
15.	RUU tentang Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
16.	RUU tentang Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
18.	RUU tentang Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
19.	RUU tentang Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
20.	RUU tentang Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
21.	RUU tentang Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
22.	RUU tentang Kota Salatiga di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
23.	RUU tentang Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
24.	RUU tentang Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
25.	RUU tentang Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
26.	RUU tentang Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
27.	RUU tentang Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
28.	RUU tentang Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
29.	RUU tentang Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
30.	RUU tentang Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
31.	RUU tentang Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
32.	RUU tentang Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
33.	RUU tentang Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
34.	RUU tentang Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
35.	RUU tentang Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
36.	RUU tentang Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
37.	RUU tentang Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
38.	RUU tentang Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
39.	RUU tentang Kota Tegal di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
40.	RUU tentang Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
41.	RUU tentang Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
42.	RUU tentang Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
43.	RUU tentang Kota Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
44.	RUU tentang Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
45.	RUU tentang Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
46.	RUU tentang Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
47.	RUU tentang Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
48.	RUU tentang Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
49.	RUU tentang Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
50.	RUU tentang Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
51.	RUU tentang Kabupaten Blora di Provinsi Jawa Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
52.	RUU tentang Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
53.	RUU tentang Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
54.	RUU tentang Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
55.	RUU tentang Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
56.	RUU tentang Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
57.	RUU tentang Kabupaten Lumajang di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
58.	RUU tentang Kota Malang di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
59.	RUU tentang Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
60.	RUU tentang Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
61.	RUU tentang Kabupaten Pamekasan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
62.	RUU tentang Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
63.	RUU tentang Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
64.	RUU tentang Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
65.	RUU tentang Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
66.	RUU tentang Kabupaten Trenggalek di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
67.	RUU tentang Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
68.	RUU tentang Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
69.	RUU tentang Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
70.	RUU tentang Kota Kediri di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
71.	RUU tentang Kabupaten Kediri di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
72.	RUU tentang Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
73.	RUU tentang Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
74.	RUU tentang Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar huku pembentukan Kabupaten
75.	RUU tentang Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
76.	RUU tentang Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
77.	RUU tentang Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
78.	RUU tentang Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
79.	RUU tentang Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
80.	RUU tentang Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
81.	RUU tentang Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
82.	RUU tentang Kota Pasuruan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
83.	RUU tentang Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
84.	RUU tentang Kota Probolinggo di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
85.	RUU tentang Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
86.	RUU tentang Kabupaten Madiun di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
87.	RUU tentang Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
88.	RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
89.	RUU tentang Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
90.	RUU tentang Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
91.	RUU tentang Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
92.	RUU tentang Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
93.	RUU tentang Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
94.	RUU tentang Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
955.	RUU tentang Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
96.	RUU tentang Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
97.	RUU tentang Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
98.	RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
99.	RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
100.	RUU tentang Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
101.	RUU tentang Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
102.	RUU tentang Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
103.	RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
104.	RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
105.	RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
106.	RUU tentang Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara)
107.	RUU tentang Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
108.	RUU tentang Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
109.	RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
110.	RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
111.	RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
112.	RUU tentang Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
113.	RUU tentang Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
114.	RUU tentang Kota Ambon di Provinsi Maluku	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota
115.	RUU tentang Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten
116.	RUU tentang Kabupaten Halmahera Barat Selatan di Provinsi Maluku Utara	Penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten



PENYUSUNAN AKD



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	AKD
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1. Perlu mengatur mengenai kepemilikan antara Lembaga Penyiaran Konvensional dan Lembaga Penyiaran <i>Multiplatform</i> 2. Perlu mengatur mengenai <i>Artificial Intelligence</i> dalam melakukan penyiaran 3. Perlu mengatur mengenai perlindungan dan pengamanan bagi data digitalisasi penyiaran 4. Perlu mengatur mengenai keamanan informasi dan konvergensi media global 5. Perlu mengatur posisi kantor berita antara dalam ekosistem penyiaran 6. Perlu mengatur agar Kementerian/Lembaga mengalokasikan belanja iklan (kehumasan) ke Lembaga Penyiaran Publik	KOMISI I

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	AKD
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh 2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh 3. Penetapan norma standar prosedur kriteria oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota	BADAN LEGISLASI





HARMONISASI



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Hak Cipta	1. Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Materiil Pasal 10 dan Pasal 114 UU tentang Hak Cipta yang hanya mengatur pengelola perdagangan, tidak mencakup pengelola platform digital berbasis <i>user generated content</i>. Putusan MK mengamanatkan perluasan lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital. 2. Perkembangan teknologi digital sehingga mempermudah penyebaran karya cipta dalam bentuk digital dan meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, regulasi hak cipta harus mengakomodasi penciptaan oleh AI dan kepemilikan atas karya tersebut, serta platform digital seperti youtube, tiktok, dan spotify yang menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan lisensi dan pembagian royalti. 3. Penyesuaian kelembagaan LMKN maupun LMK. 4. Pengelolaan royalti yang lebih transparan menggunakan sistem pengelolaan royalti secara digital yang dapat diakses oleh LMKN, LMK, maupun Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. 5. Penyesuaian ketentuan pidana dengan kategorisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 6. Memperkuat mekanisme penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I



More information
[puupolhukham](#)



Visit our website
[puupolhukham.dpr.go.id](#)

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	1. Penguatan LPSK dalam sistem peradilan tindak pidana terpadu 2. Penguatan LPSK dalam system penegakan hukum 3. Penyesuaian materi dengan RUU KUHP terkait dengan penguatan hak saksi dan korban 4. Pembentukan perwakilan LPSK di provinsi
2.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1. Memperkuat landasan hukum lembaga 2. Menjawab tantangan disrupsi ideologi di era digital 3. Koordinasi lintas sektor yang efektif 4. Menjamin keberlanjutan pembinaan ideologi 5. Menjawab kritik terhadap BPIP





PEMBICARAAN TINGKAT I



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan. 2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita. 3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak. 4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.
2.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif	1. Kesepakatan ini diapresiasi karena permasalahan ini sudah mengemuka di antara kedua negara sejak tahun 2003 ketika RI-Vietnam menyetujui perjanjian penetapan batas landas kontinen. 2. Memperkuat modal politik dan diplomasi RI di kawasan yang berimbas dianggapnya Indonesia menjadi <i>role-model</i> di tengah komitmen <i>role-based community</i> negara ASEAN. 3. Memperkuat sentralitas ASEAN meskipun belum cukup. 4. Perlunya sosialisasi ke asosiasi nelayan dan tokoh masyarakat karena memiliki kapabilitas untuk berlayar jauh ke kawasan <i>traditional fishing ground</i>-nya, termasuk melewati garis batas ZEE yang sudah disepakati dengan Vietnam. 5. Cina berpotensi menunjukkan sikap protes dan keberatan kepada Indonesia dan Vietnam. 6. Menyusun kesepakatan bilateral RI-Vietnam yang bertujuan mengantisipasi manuver <i>intelligence gathering</i> Vietnam di ZEE Indonesia. 7. Indonesia belum memiliki <i>coast guard</i>, sementara bakamla belum diakui secara internasional.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	MATERI MUATAN RUU
3.	RUU tentang Desain Industri (berdasarkan Rapat Pengganti Rapat Bamus tanggal 12 November 2025 pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri ditugaskan kepada Pansus DPR RI dengan komposisi keanggotaan terdiri dari anggota Komisi III, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XIII DPR RI)	Materi muatan yang diatur dalam RUU ini antara lain meliputi: 1. Sistem perlindungan Hak Desain Industri dengan pendekatan <i>sui generis</i> menerapkan dua jenis perlindungan yakni perlindungan Hak Desain Industri melalui sistem pencatatan (<i>unregistered design</i>) yang diberikan secara otomatis (sistem deklaratif) dan perlindungan Hak Desain Industri melalui sistem pendaftaran (<i>registered design</i>). 2. Pelindungan terhadap pemakai terdahulu. 3. Obyek perlindungan Hak Desain Industri adalah Desain Industri yang merupakan tampilan luar dari sebuah produk baik secara keseluruhan maupun sebagian yang mempunyai kesan estetik, dan tampilan tersebut dihasilkan dari fitur yang meliputi garis, warna, komposisi garis dan warna, bentuk, konfigurasi, corak, dan/atau ornamentasi Untuk dapat diberikan Hak Desain Industri, suatu Desain Industri harus memenuhi syarat kebaruan. 4. Untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, Pemerintah Pusat atau pihak ketiga yang diberi izin oleh Pemerintah Pusat dapat melaksanakan Hak Desain Industri dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Hak Desain Industri. 5. Prosedur permohonan pendaftaran Hak Desain Industri dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman Permohonan, pemeriksaan substantif, persetujuan atau penolakan, pengumuman dan pemberian sertifikat 6. Dalam hal suatu Desain Industri menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang Hak Desain Industri tidak dapat melaksanakan Hak Desain Industri kecuali ada persetujuan dari pemilik hak tersebut. 7. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	MATERI MUATAN RUU
4.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional (berdasarkan Rapat Pengganti Rapat Bamus tanggal 12 November 2025 pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ditugaskan kepada Pansus DPR RI dengan komposisi keanggotaan terdiri dari anggota Komisi III dan Komisi XIII DPR RI)	Materi muatan yang diatur dalam RUU ini meliputi: a. subjek hukum perdata; b. hukum keluarga; c. benda dan hak kebendaan; d. pewarisan; e. perjanjian; f. perbuatan melanggar hukum; g. yurisdiksi internasional Pengadilan Indonesia; dan h. pengakuan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Asing.



PEMBICARAAN TINGKAT II



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Disetujui dalam Rapat Paripurna 20 Maret 2025 (UU Nomor 3 Tahun 2025)
2.	RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 4 Tahun 2025)
3.	RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 5 Tahun 2025)
4.	RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 6 Tahun 2025)
5.	RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 7 Tahun 2025)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
6.	RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 8 Tahun 2025)
7.	RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 9 Tahun 2025)
8.	RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 10 Tahun 2025)
9.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 11 Tahun 2025)
10.	RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 12 Tahun 2025)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
11.	RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025 (UU Nomor 13 Tahun 2025)
12.	RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition</i>)	Disetujui dalam Rapat Paripurna 2 Oktober 2025
13.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	Disetujui dalam Rapat Paripurna 18 November 2025
14.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 25 November 2025
15.	RUU tentang Penyesuaian Pidana	Disetujui dalam Rapat Paripurna 8 Desember 2025